
Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Audit pada Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya

James Kastanya *¹, Yuliet F. Syam ², Fredy Tiblola³, Johanna Kamesrar⁴, Wisnu Warodyo⁵

^{1,2,3,4}Manajemen, STIE Bukit Zaitun Sorong, Indonesia

*e-mail: kastanyajansenkastanya@gmail.com¹, jhonatansalossa@gmail.com², fredytiblola@gmail.com³, Johannakamesrar@stiebukitzaitun.ac.id⁴, wisnuw886@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kualitas audit pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel jenuh, melibatkan seluruh populasi sebanyak 44 pegawai sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,504 mengindikasikan bahwa 50,4% variasi kualitas audit dapat dijelaskan oleh penerapan GCG, sementara 49,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kesimpulannya, semakin baik penerapan prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh instansi.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Kualitas Audit, BPKP, Papua Barat Daya, Regresi Linier.

Abstract

This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance (GCG) implementation on audit quality at the Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of Southwest Papua Province. This research employs a quantitative method with a saturation sampling technique, involving the entire population of 44 employees as respondents. Data collection was conducted using questionnaires and analyzed using simple linear regression. The results indicate that GCG has a positive and significant effect on audit quality, evidenced by a significance value of 0.000. The coefficient of determination value of 0.504 indicates that 50.4% of the variation in audit quality can be explained by GCG implementation, while the remaining 49.6% is influenced by other factors outside the research model. In conclusion, better implementation of GCG principles—transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness—results in higher audit quality produced by the agency.

Keywords: Good Corporate Governance, Audit Quality, BPKP, Southwest Papua, Linear Regression.

1. PENDAHULUAN

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam sektor pemerintahan telah menjadi tuntutan global untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan berwibawa. Di Indonesia, urgensi ini tercermin melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa tata kelola yang baik berkorelasi lurus dengan kredibilitas laporan keuangan negara. GCG tidak hanya berfungsi memperkuat kualitas audit, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik. Tanpa tata kelola yang kuat, risiko asimetri informasi dan konflik

kepentingan antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat) akan meningkat, yang berpotensi mencederai integritas pelaporan keuangan (Zulkarnaen et al., 2021).

Secara teoritis, GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau organisasi untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan dan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Dalam konteks sektor publik, prinsip-prinsip utama GCG—yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran—berfungsi sebagai pilar pengendalian internal. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis diambil dengan penuh kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif bagi auditor untuk bekerja secara objektif (Putra et al, 2024).

Hubungan antara GCG dan kualitas audit sangat erat. Mekanisme tata kelola yang baik, seperti keberadaan pimpinan yang suportif terhadap independensi dan sistem pengawasan yang ketat, diyakini dapat memitigasi tekanan eksternal yang sering dihadapi auditor. Kualitas audit bukan sekadar tentang menemukan kesalahan, melainkan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Ketika sebuah instansi menerapkan GCG secara konsisten, auditor internal memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengakses data, melakukan pengujian substantif, dan melaporkan temuan tanpa intervensi, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi lebih andal dan akurat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mendokumentasikan dampak positif GCG terhadap kualitas audit. Studi yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dan Yuliana (2020) pada lingkungan Kantor Akuntan Publik dan BPKP di wilayah lain menunjukkan bahwa dimensi independensi dan akuntabilitas dalam GCG berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas audit. Namun, literatur yang ada juga mencatat variasi hasil tergantung pada konteks organisasi dan kematangan birokrasi tempat audit dilakukan. Hal ini menyisakan celah empiris untuk menguji kembali konsistensi teori tersebut pada entitas pemerintahan yang baru terbentuk, di mana struktur tata kelola mungkin belum mapan sepenuhnya.

Dalam ekosistem pengawasan nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memegang peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kualitas audit yang dihasilkan BPKP menjadi barometer awal kesehatan keuangan daerah sebelum diaudit secara eksternal. Oleh karena itu, internalisasi GCG di tubuh BPKP sendiri menjadi prasyarat mutlak. Namun, tantangan spesifik muncul pada Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai instansi vertikal di Daerah Otonomi Baru (DOB), kantor ini menghadapi kompleksitas unik berupa kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur, serta masa transisi birokrasi pasca pemekaran yang rentan terhadap ketidakefisienan tata kelola.

Kondisi "bayi baru lahir" pada Provinsi Papua Barat Daya menuntut standar pengawasan yang ekstra ketat, namun di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem yang baru dibangun menjadi kendala tersendiri. Pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan secara efektif di tengah keterbatasan tersebut, dan apakah pengaruhnya terhadap kualitas audit tetap signifikan seperti pada instansi yang sudah mapan? Isu ini penting untuk diteliti mengingat kegagalan audit di daerah pemekaran baru dapat berimplikasi luas pada terhambatnya pembangunan daerah dan penurunan kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kualitas audit pada Kantor BPKP Provinsi Papua

Barat Daya. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan (*novelty*) dengan menyoroti efektivitas tata kelola pada entitas pengawas di wilayah DOB yang memiliki karakteristik risiko berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai urgensi penguatan pilar-pilar GCG sebagai instrumen vital dalam menjamin mutu pengawasan keuangan negara di daerah perbatasan dan pemekaran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel melalui data numerik yang dianalisis secara statistik. Penelitian dilaksanakan pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Daya yang berlokasi di Kota Sorong. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Agustus hingga Oktober 2025.

Populasi dalam penelitian ini mengacu pada definisi Sugiyono (2019), yaitu keseluruhan subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Populasi mencakup seluruh pegawai BPKP Provinsi Papua Barat Daya yang berjumlah 44 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh (*census sampling*), di mana seluruh anggota populasi sebanyak 44 pegawai dijadikan responden.

Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5. Instrumen penelitian untuk variabel independen, yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), dikembangkan berdasarkan indikator dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sementara itu, variabel dependen Kualitas Audit diukur menggunakan indikator yang diadopsi dari DeAngelo (1981) dan Arens et al. (2017), yang mencakup kompetensi auditor, independensi auditor, integritas audit, kualitas laporan, dan efektivitas audit.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS. Tahapan pengujian meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengukur pengaruh GCG terhadap kualitas audit, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besaran kontribusi variabel independen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 44 responden dari pegawai BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Berdasarkan analisis deskriptif, variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar **4,33**, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Indikator Independensi (X_4) menjadi kontributor tertinggi dengan skor rata-rata 4,59, menunjukkan bahwa auditor merasa bebas dari intervensi dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, variabel Kualitas Audit (Y) memiliki nilai rata-rata **4,45** (Sangat Tinggi). Indikator Manfaat Rekomendasi Audit (Y_5) memperoleh skor tertinggi (4,55), yang mengindikasikan bahwa hasil audit dinilai memberikan dampak positif yang signifikan bagi perbaikan tata kelola.

3.1. Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan seluruh item pernyataan memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,297),

sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel GCG sebesar 0,82 dan Kualitas Audit sebesar 0,85, yang berarti instrumen penelitian reliabel.

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis regresi:

- **Uji Normalitas:** Nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 ($> 0,05$), menunjukkan data berdistribusi normal.
- **Uji Multikolinearitas:** Nilai *Tolerance* 0,78 ($> 0,10$) dan VIF 1,28 (< 10), menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas.
- **Uji Heteroskedastisitas:** Uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0,312 ($> 0,05$), yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

3.1.1. Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh GCG terhadap kualitas audit dilakukan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Ringkasan hasil analisis disajikan dalam Tabel 1 berikut..

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Mean	Kategori
Good Corporate Governance (X)	Transparansi (\$X_1\$)	4,02	Tinggi
	Akuntabilitas (\$X_2\$)	4,11	Tinggi
	Responsibilitas (\$X_3\$)	4,48	Sangat Tinggi
	Independensi (\$X_4\$)	4,59	Sangat Tinggi
	Kewajaran (\$X_5\$)	4,43	Sangat Tinggi
Rata-rata Variabel X		4,33	Sangat Tinggi
Kualitas Audit (Y)	Kompetensi (\$Y_1\$)	4,45	Sangat Tinggi
	Independensi (\$Y_2\$)	4,39	Sangat Tinggi
	Integritas (\$Y_3\$)	4,52	Sangat Tinggi
	Kualitas Laporan (\$Y_4\$)	4,32	Sangat Tinggi
	Efektivitas (\$Y_5\$)	4,55	Sangat Tinggi
Rata-rata Variabel Y		4,45	Sangat Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 8,214 + 0,687X + e$$

Nilai t_{hitung} sebesar 6,214 lebih besar dari t_{tabel} (2,018) dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima, yaitu **Good Corporate Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit** pada BPKP Provinsi Papua Barat Daya.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,504 menunjukkan bahwa 50,4% variasi dalam kualitas audit dapat dijelaskan oleh penerapan prinsip-prinsip GCG. Sementara sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

3.1.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Temuan ini secara statistik dibuktikan melalui nilai t_{hitung} sebesar 6,214 yang lebih besar dari t_{tabel} (2,018), dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,687 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel GCG akan meningkatkan kualitas audit sebesar 0,687 satuan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat komitmen instansi dalam menjalankan prinsip tata kelola, maka semakin andal pula laporan pengawasan yang dihasilkan oleh para auditor internalnya.

Secara teoretis, pengaruh positif ini berakar pada penguatan ekosistem kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan BPKP. Prinsip transparansi memastikan tersedianya akses informasi yang terbuka bagi auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut kejelasan fungsi dan tanggung jawab sehingga setiap penyimpangan dapat dipantau dan dievaluasi secara tepat. Ketika sebuah organisasi menerapkan GCG secara konsisten, auditor memiliki landasan moral dan operasional yang kuat untuk bekerja secara objektif tanpa tekanan kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan nilai tambah berupa rekomendasi hasil audit yang benar-benar bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Analisis deskriptif terhadap data penelitian memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kekuatan variabel penelitian ini, di mana nilai rata-rata variabel GCG mencapai 4,33 (kategori sangat tinggi). Menariknya, indikator independensi (X_4) memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,59. Hal ini mengonfirmasi bahwa auditor pada Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya memiliki persepsi yang sangat kuat terhadap kebebasan mereka dalam menjalankan tugas pemeriksaan tanpa intervensi eksternal. Independensi yang terjaga dengan baik merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya kualitas audit yang kredibel, karena memungkinkan auditor untuk melaporkan kondisi yang sebenarnya tanpa rasa takut.

Temuan ini memiliki urgensi yang besar mengingat posisi strategis BPKP Provinsi Papua Barat Daya sebagai instansi pengawas di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Barat Daya menghadapi tantangan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, penerapan GCG bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen vital untuk membangun kredibilitas laporan keuangan negara di wilayah pemekaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski dalam kondisi tantangan geografis yang luas dan beragam, komitmen terhadap tata kelola mampu menjaga integritas fungsi pengawasan tetap optimal.

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan studi-studi terdahulu memperkuat validitas temuan secara empiris. Penelitian ini mendukung temuan Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta sejalan dengan penelitian Yuliana (2020) yang menemukan bahwa independensi meningkatkan objektivitas audit pada lingkungan BPKP Sumatera Utara. Konsistensi hasil ini di berbagai lokasi penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan variabel universal yang sangat menentukan tinggi rendahnya kualitas hasil pemeriksaan di lembaga pengawas pemerintah (APIP).

Dilihat dari kemampuan model, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,504 mengindikasikan bahwa 50,4% variasi dalam kualitas audit dapat dijelaskan oleh variabel GCG. Angka ini mencerminkan pengaruh yang cukup dominan, di mana setengah dari keberhasilan mutu audit di BPKP ditentukan oleh seberapa baik prinsip tata kelola diinternalisasi dalam operasional kantor. Hal ini memberikan arah kebijakan yang jelas bagi manajemen instansi untuk terus memperkuat pilar-pilar GCG—khususnya transparansi dan akuntabilitas—sebagai strategi utama dalam mempertahankan standar kualitas audit yang telah dicapai.

Meskipun pengaruh GCG sangat signifikan, terdapat sisa variasi sebesar 49,6% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Faktor-faktor eksternal tersebut, yang tercermin dalam nilai error (e), meliputi aspek kompetensi auditor, pengalaman penugasan, kepatuhan terhadap kode etik profesi, serta tekanan waktu dalam pemeriksaan. Penjelasan ini menegaskan pandangan DeAngelo (1981) bahwa kualitas audit tidak hanya bergantung pada independensi (yang merupakan bagian dari GCG), tetapi juga pada kemampuan teknis auditor untuk menemukan salah saji material. Oleh karena itu, efektivitas sistem tata kelola harus didukung oleh peningkatan kapasitas intelektual auditor agar hasil audit yang dihasilkan semakin komprehensif.

Sebagai sintesis, pembahasan ini menunjukkan bahwa BPKP Provinsi Papua Barat Daya telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai tata kelola dalam proses bisnisnya, yang dibuktikan dengan tingginya nilai rata-rata kualitas audit sebesar 4,45. Tingginya manfaat rekomendasi audit ($\$5$) yang dirasakan oleh responden menjadi bukti nyata bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol internal telah berjalan efektif. Ke depan, sinergi antara penguatan prinsip GCG secara organisasi dan peningkatan kompetensi auditor secara personal akan menjadi kunci utama bagi BPKP untuk terus memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan daerah yang lebih bersih dan transparan.

4. KESIMPULAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada Kantor BPKP Provinsi Papua Barat Daya. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,687 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mengindikasikan bahwa semakin baik internalisasi prinsip-prinsip tata kelola, maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan oleh instansi tersebut. Temuan ini mempertegas bahwa komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keandalan laporan pengawasan di wilayah tersebut.

Nilai koefisien determinasi (R^2) mencapai 0,504, yang berarti variabel GCG mampu menjelaskan 50,4% variasi dalam kualitas audit. Namun, terdapat sisa variasi sebesar 49,6% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, yang tercermin dalam nilai error (e). Faktor-faktor eksternal tersebut meliputi kompetensi dan independensi auditor APIP, pengalaman penugasan audit, kepatuhan terhadap kode etik profesi, tekanan waktu pemeriksaan, beban kerja auditor, serta kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sebagai langkah perbaikan, BPKP Provinsi Papua Barat Daya disarankan untuk terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip GCG, khususnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam seluruh proses bisnis pengawasan. Mengingat besarnya pengaruh faktor di luar tata kelola, instansi juga perlu memberikan perhatian lebih pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme auditor melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan teknis audit. Pengelolaan beban kerja dan penjagaan independensi secara ketat juga menjadi aspek krusial agar auditor dapat melaksanakan tugas secara objektif dan optimal.

Untuk pengembangan studi di masa depan, disarankan agar peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti etika profesi, pengalaman kerja, tekanan waktu audit, dan kualitas SPIP. Selain itu, memperluas objek

penelitian serta menambah jumlah responden diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Hal ini penting agar hasil penelitian di masa mendatang memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas bagi berbagai institusi pengawas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). Auditing and assurance services.
- Andriyani, I., Sakarina, S., Suharti, S., & Efrizal, H. (2022). Pengaruh Aset Lancar, hutang Jangka Panjang, Ekuitas, Laba Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di BEI. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 903-916.
- Anggrelia Afrida, S. E. (2024). Konsep Dasar Akuntansi Sektor. *Akuntansi Sektor Publik*, 15.
- Chaerani, E. Y., & Wibowo, P. (2025). Performance of Local Government Determinants in Indonesia: The Moderating Role of Government Internal Control System. *EQUITY: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, AKUNTANSI*, 28(1), 110-134.
- Damayanti, D. N., Suhendar, D., & Martika, L. D. (2023). Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1).
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. *Journal of accounting and economics*, 3(3), 183-199.
- Dewi, N. K. D. P., Sulindawati, N. L. G. E., & Masdiantini, P. R. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2020-2024. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 89-99.
- Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook* (p. 197). Springer Nature.
- Islami, D., & Wulandari, A. (2023). Pengaruh GCG, Struktur Modal, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Tambang. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(2), 254-268.
- Indryanigraha, P. E. T., & Dewi, N. A. W. T. (2025). Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 64-76.
- Indonesia, A. A. I. P. (2013). Standar audit intern pemerintah Indonesia. *Jakarta: AAIPI*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Putra, S. A. A. K., Muhammad, N. I., Fathoni, M., Asmawan, Y. F. A., Hikmah, N., & Rachmadana, S. L. (2024). Penerapan Strategi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Pengunjung Pada Wisata Edukasi Kampung Gerabah Pagelaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Proficio*, 5(2), 727-734.
- Rahajaan, B. C. H., Balia, N., & Hammar, Y. T. K. R. (2025). DESENTRALISASI FISKAL DAN KETIMPANGAN KINERJA KEUANGAN DAERAH: PENDEKATAN DATA PANEL PADA PROVINSI PAPUA BARAT. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(2).
- Rosalinda, U. U., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2022). Literature review pengaruh gcg, csr dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(6), 667-673.
- Simanjuntak, P. (2025). Analysis of factors affecting the quality of financial statements of central

government institutions: An empirical study in Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 15(9), 1471.

Syafii, M. (2025). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8261-8268.

Triana, D., Muhsin, M., Heniwati, E., Mustika, I. G., & Umyana, A. (2024). Good Corporate Governance and Internal Audit on Financial Performance with Firm Size as a Moderating Variable in Financial Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange, 2020-2023. *Sebatik*, 28(2), 458-466.